



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JALAN PEMBANGUNAN NO.21 PADANG HARAPAN | BENGKULU

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi pada Tahun Anggaran 2022. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu 2022 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2022 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja dan juga analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2022.

Harapan kami LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat atas tanggung jawab yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, dan juga sebagai pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu di masa yang akan datang.



Bengkulu, 21 Februari 2023


Pramodana Kumara Kusumah Atmadja

RINGKASAN EKSEKUTIF



Sepanjang tahun 2022, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Bengkulu ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 8 (delapan) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu :

1. Sasaran mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Sasaran meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar 100,47%.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam grafik dan tabel disamping :

Tabel 1

SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

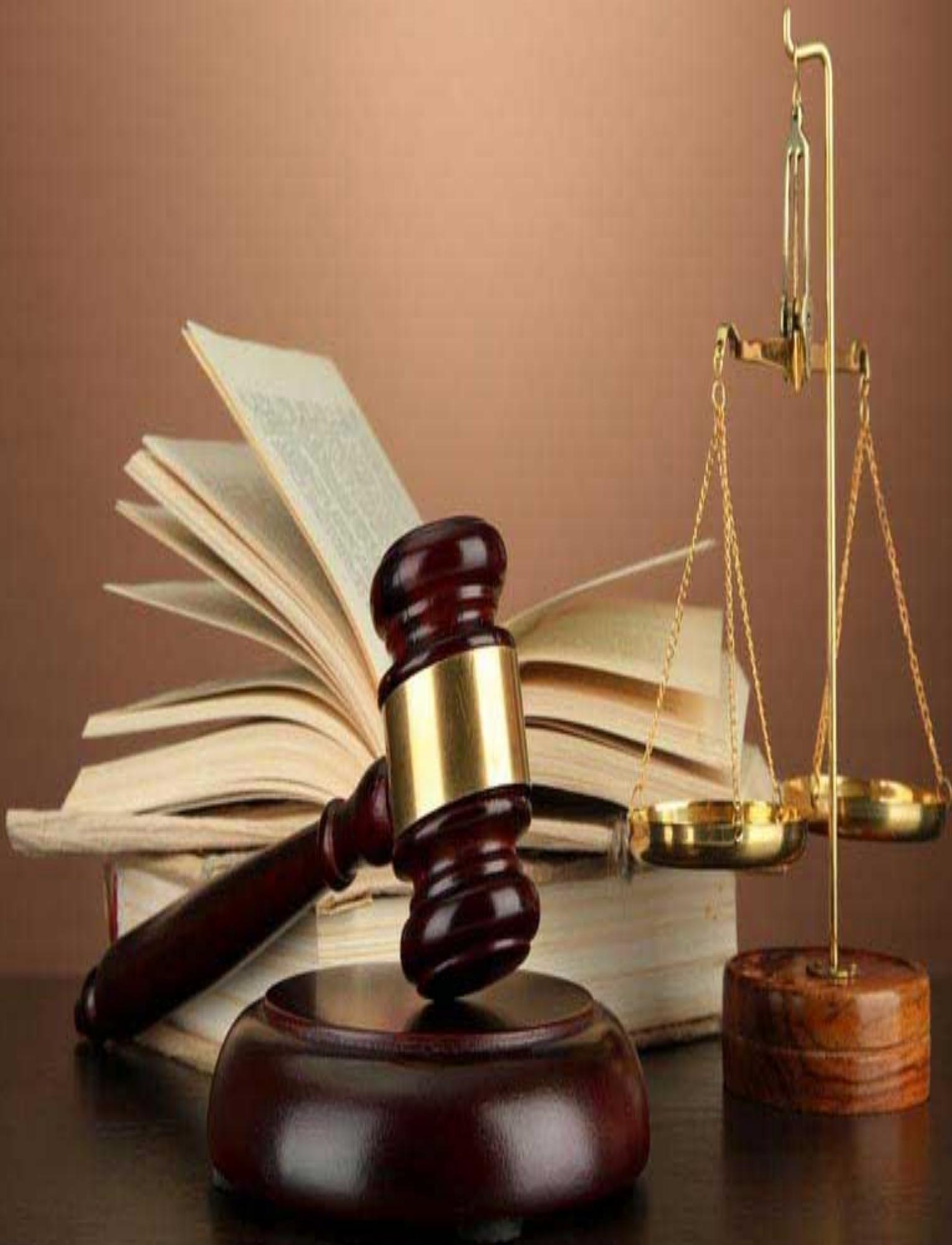
INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	55,22 %	55 %	100,40 %
Index Persepsi Keuasan <i>Stakeholder</i>	99,07 %	95 %	104,28 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100,94 %

Tabel 2

SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %





DAFTAR ISI

i
ii
iv
v
vi
vii

1

KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Tugas Pokok dan Fungsi	2
Struktur Organisasi	4
Isu Strategis	6
Sistematika Penyajian	9

10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024	11
Rencana Kinerja Tahun 2022	14
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15

16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi	18
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
Realisasi Anggaran	36

40

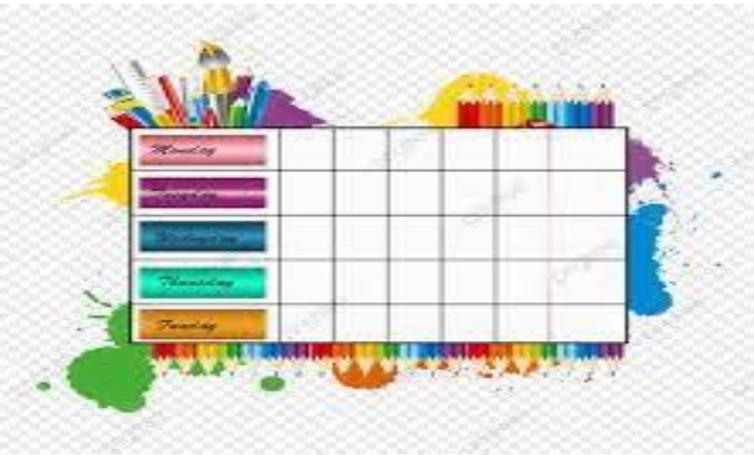
BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan	41
Rekomendasi	42

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL



Tabel 1	Sasaran Strategis 1	ii
Tabel 2	Sasaran Strategis 2	ii
Tabel 3	Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	1
Tabel 4	Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 5	Rencana Kinerja Tahun 2022	14
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
Tabel 7	Pengukuran Capaian Kinerja	18
Tabel 8	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yg Pasti, Transparan dan Akuntabel	19
Tabel 12	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	24
Tabel 13	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	25
Tabel 14	Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	27
Tabel 15	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	28
Tabel 16	Index Persepsi Kepuasan Stakeholder.....	30
Tabel 17	Pengukuran Indikator Index Persepsi Kepuasan Stakeholder Tahun 2022.....	30
Tabel 18	Rata-rata Pengukuran Index Kepuasan Masyarakat per Unsur	30
Tabel 19	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	31
Tabel 20	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	32
Tabel 21	Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	33
Tabel 22	Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	35
Tabel 23	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2022.....	36
Tabel 24	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2022.....	37
Tabel 25	Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2022.....	37
Tabel 26	Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara	38
Tabel 27	Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara	38
Tabel 28	Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2022	38
Tabel 29	Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2022	38
Tabel 30	Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja	39

DAFTAR GRAFIK



Grafik 1	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	19
Grafik 5	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	24
Grafik 6	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	26
Grafik 7	Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan.....	27
Grafik 8	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	29
Grafik 9	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	31
Grafik 10	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	32
Grafik 11	Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	34
Grafik 12	Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	35
Grafik 13	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2022.....	37
Grafik 14	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2022.....	37

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1	Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	2
Gambar 2	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu	4
Gambar 3	Rincian Biaya Perkara di SIPP	38

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat dimulai dari berkualitasnya sistem perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya sistem evaluasi kinerja internal.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor tanggal tentang, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu atas penggunaan anggaran tahun 2022. Laporan Kinerja Tahun 2022 ini telah membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Capaian Kinerja.

Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Propinsi Bengkulu yaitu :

Tabel 3 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI	WILAYAH HUKUM	KELAS
1.	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kelas 1A
2.	PENGADILAN NEGERI CURUP	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	Kelas 1B
3.	PENGADILAN NEGERI MANNA	Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kelas II
4.	PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR	Argamakmur	Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Tengah	Kelas II
5.	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Bintuhan	Kabupaten Kaur	Kelas II
6.	PENGADILAN NEGERI TAIS	Tais	Kabupaten Seluma	Kelas II
7.	PENGADILAN NEGERI TUBEI	Tubei	Kabupaten Lebong	Kelas II
8.	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	Kepahiang	Kabupaten Kepahiang	Kelas II
9.	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	Mukomuko	Kabupaten Mukomuko	Kelas II

Gambar 1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).



Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki Fungsi sebagai berikut :

Fungsi Mengadili

yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.

Fungsi Pembinaan

yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi, peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.



Fungsi Pengawasan

yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum



Fungsi Nasehat

yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.



Fungsi Administrasi

yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, secara ringkas dituangkan pada bagan berikut :

Gambar 2 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



KETUA PENGADILAN

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan

WAKIL KETUA

Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan

HAKIM TINGGI

Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan.

PANITERA

Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Terdiri atas :

1. Panitera Muda Perdata
Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata
2. Panitera Muda Pidana
Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
3. Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor
Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
4. Panitera Muda Hukum
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.

PANITERA PENGGANTI

Membantu HakimTinggi dalam persidangan perkara perdata, pidana, dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

SEKRETARIS

Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi terdiri atas :

A. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

B. Bagian Umum dan Keuangan

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

BAGIAN PERENCANAAN & KEPEGAWAIAN

Terdiri atas :

1. Subbag Rencana Program dan Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

2. Subbag Kepegawaian Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Terdiri atas :

1. Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi tata usaha dan rumah tangga, keprotokolan, perpustakaan serta hubungan masyarakat.

2. Subbag Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Terdiri atas :

1. Pranata Komputer

Mempunyai tugas menganalisis informasi, perancangan sistem informasi, perancangan sistem komputer, perancangan dan pengembangan database.

2. Arsiparis

Mempunyai tugas melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan autentik dan naskah asli arsip terjaga.

KELOMPOK PELAKSANA

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan dari masing-masing subbagian pelaksana tersebut ditempatkan.

D. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sepanjang Tahun 2022 terkait dengan kemajuan atau pun perubahan di lembaga peradilan umum khususnya pada Pengadilan Tinggi Bengkulu antara lain :

1. Perjanjian Kerjasama Implementasi E-Berpadu untuk mendukung Implementasi SPPT-TI di wilayah Provinsi Bengkulu. Aplikasi E-Berpadu ini meliputi berbagai macam pelayanan diantaranya yaitu :

- Pelimpahan berkas perkara secara elektronik
- Permohonan izin/persetujuan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan secara elektronik
- Permohonan izin besuk secara elektronik
- Permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik
- Penetapan Diversi

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara mulai dari hulu ke hilir di kalangan aparat penegak hokum di Indonesia, khusus nya di Provinsi Bengkulu

2. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui langkah Reformasi Birokrasi yang bermuara kepada usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan aparat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi dalam proses birokrasi yang efektif dan efisien. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melakukan pencanangan zona integritas pada tahun 2017 dan hingga saat ini terus berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM.

PENGADILAN TINGGI BENGKULU BerAKHLAK bangga melayani bangsa CERDAS!



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Implementasi Aplikasi e-BERPADU Untuk Mendukung Implementasi SPPT-TI Di Wilayah Provinsi Bengkulu

09 November 2022

Ceramah, Enyahkan KKN, Responsif, Disiplin, Afil, Sojaktora

[f](#) Pengadilan Tinggi Bengkulu [@](#) pengadilantinggibengkulu [v](#) Pengadilan Tinggi Bengkulu <https://pt-bengkulu.go.id>

PENGADILAN TINGGI BENGKULU



RAPAT PLENO PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN PENENTUAN TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PT BENGKULU TAHUN 2022

24 JANUARI 2022

Ceramah, Enyahkan KKN, Responsif, Disiplin, Afil, Sojaktora

[f](#) Pengadilan Tinggi Bengkulu [@](#) pengadilantinggibengkulu [v](#) Pengadilan Tinggi Bengkulu <https://pt-bengkulu.go.id>

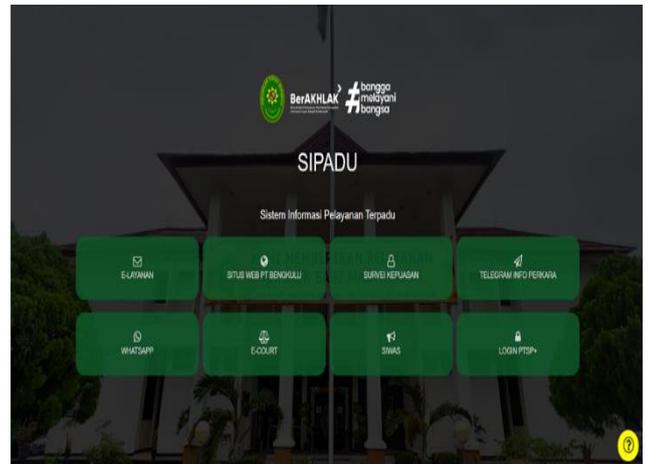
3. Membangun berbagai inovasi yang mendukung peningkatan kinerja dan layanan kepada masyarakat, antara lain :

a. E-SIPADU

Merupakan Aplikasi PTSP Online yang memberikan layanan secara daring kepada Stakeholder. Pengguna layanan dapat mengirim surat melalui aplikasi ini sehingga bisa menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Tinggi Bengkulu

b. KAPITAN

Merupakan aplikasi yg berguna sebagai sarana komunikasi dua arah yg responsif dan siaga dalam menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat/stakeholder



c. TIARA

Merupakan Aplikasi Bot berbasis Telegram untuk mendapatkan info perkara tingkat pertama pada seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu



APAKAH KAMU TAHU?

PENGADILAN TINGGI BENGKULU PUNYA:

LAYANAN TELEGRAM BOT INFO PERKARA INI MERUPAKAN LAYANAN ONLINE YANG CEPAT DAN AKURAT DENGAN UPDATE DATA SECARA REALTIME. MASYARAKAT LUAS DAPAT MEMANFAATHAN TELEGRAM BOT INFO PERKARA DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PERPESANAN TELEGRAM YANG DAPAT DIUNDUH PADA PONSEL PINTAR ANDA SECARA GRATIS.

TELEGRAM BOT INFO PERKARA

LAYANAN INI MENCAHUP BEBERAPA FUNGSI DIANTARANYA:

- JADWAL SIDANG
- INFORMASI TILANG
- SISA PANJAR PERKARA
- INFORMASI PERKARA

UNTUK MENGGUNAKANNYA CUKUP MUDAH. ANDA HANYA PERLU MEMBUKA APLIKASI TELEGRAM PADA PONSEL PINTAR ANDA DAN MENCAIRI ID TELEGRAM:

@sippmabot
(<http://t.me/sippmabot?start>)

4. Adaptasi “new normal” selama masa pandemi dalam pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19, PT Bengkulu menerapkan protokol kesehatan sesuai petunjuk pada SEMA Nomor 1 s/d 9 Tahun 2020. Adaptasi *new normal* tersebut terlihat pada pelaksanaan Vaksin Booster Dosis Ketiga di awal Tahun 2022.

5. Bimbingan Teknis Pelaksanaan E-Court, SIPP, SPPT-TI, Minutasi dan Pemberkasan Perkara bagi Panitera dan Jurusita Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Materi yang disampaikan pada Bimtek ini antara lain mengenai SPPT-TI, Teknik dan Simulasi E-Court dan E-Litigasi, Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan E-Court, E-Litigasi dan E-Court Banding.

6. Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum dalam Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan. Bimbingan Teknis yang melibatkan Pimpinan dan Hakim di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah Bengkulu dengan narasumber oleh Bapak Dirjen Badilum, didampingi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

7. Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas. Acara ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah Bengkulu yang menangani Akuntabilitas Kinerja dan menyusun Laporan AKIP di satuan kerjanya.



PELAKSANAAN VAKSIN BOOSTER PENGADILAN TINGGI BENGKULU

01 - 02 JANUARI 2022



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN E-COURT, SIPP, SPPT-TI, DAN MINUTASI DAN PEMBERKASAN PERKARA BAGI PANITERA DAN JURUSITA

16 - 18 MARET 2022



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BIMBINGAN TEKNIS ANTAR PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERADILAN

11-14 SEPTEMBER 2022

Comet, Unyahkan KKM, Responsif, Disiplin, Adil, Segaktra

Pengadilan Tinggi Bengkulu @pengadiltinggibengkulu Pengadilan Tinggi Bengkulu https://ptb.bengkulu.go.id



BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SAKIP DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

09 - 11 MARET 2022

Comet, Unyahkan KKM, Responsif, Disiplin, Adil, Segaktra

Pengadilan Tinggi Bengkulu @pengadiltinggibengkulu Pengadilan Tinggi Bengkulu https://ptb.bengkulu.go.id

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis dan Sistematika Penyajian;

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022;

Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisa nya dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah-langkah yang akan diambil di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Penghargaan yang diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2022



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui perencanaan yang efektif, terarah dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Rencana Strategis 2020-2024 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.



1. VISI

Visi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU YANG AGUNG”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil rewiu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2020 sampai dengan 2024, sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu ;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Index Persepsi Kepuasan Stakeholder.

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
- Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut telah direwiu untuk mempertajam Sasaran Strategis. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan
			b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan
			c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan
			e. Index Persepsi Kepuasan Stakeholder	Perbandingan antara jumlah responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan peradilan tingkat banding dengan jumlah responden peradilan tingkat pertama
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
			b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus
			c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diputus

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut :

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Indikator Kegiatan : perkara peradilan umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu.
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian Indikator Kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.
Program dan kegiatan ini untuk menunjang pelayanan peradilan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.
Indikator Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung SIPP.
Program dan kegiatan ini untuk memenuhi layanan dukungan manajemen pengadilan sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja tahun 2022 Pengadilan Tinggi Bengkulu memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau disebut juga dengan Perjanjian Kinerja.



Tabel 5 Rencana Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	1 layanan	Rp.17.061.502.000,-
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	55 %					
		Index Persepsi kepuasan Stakeholder	95 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	1 layanan	Rp.824.166.000,-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	142 perkara	Rp.271.840.000,-
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%					
		Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%					

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2022 merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuvi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan.



Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	55%
		Index Persepsi Kepuasan Stakeholder	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	20.372.877.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	824.166.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	271.840.000

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA





AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.



EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

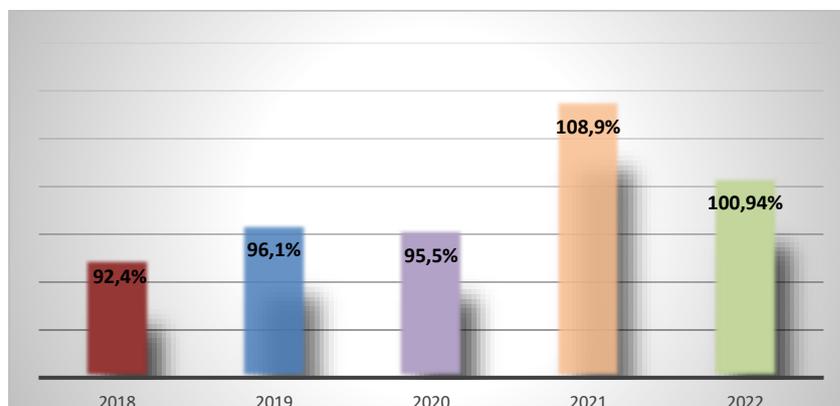
SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel 8 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99,7%	102,4%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86,5%	103,5%	100%	100%	100%
c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	108,7%	80,7%	100%	100%	100%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	44,9%	80,2%	61,4%	156,86%	100,40%
e. Index Persepsi Kepuasan Stakeholder	99,0%	102,1%	102,6%	114,94%	104,28%
Capaian Sasaran	92,4%	96,1%	95,5%	108,97%	100,94%

Grafik 1 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan upaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, ketepatan waktu penyelesaian perkara, penurunan sisa perkara, kepuasan terhadap hasil putusan serta kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Pada sasaran ini terdapat 5 indikator kinerja yang diukur.

Data pada tabel 4 dan grafik 1 menunjukkan bahwa capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2022 sebesar **100,94%**. Persentase capaian tahun 2022 ini menurun bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2021.

Penurunan angka persentase capaian sasaran ini bukan disebabkan oleh adanya target-target yang tidak dapat tercapai, melainkan disebabkan oleh adanya penetapan target kinerja yang lebih tinggi :

- ✓ dari yang sebelumnya 30% di tahun 2021 menjadi 55% di tahun 2022 untuk indikator kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- ✓ dari yang sebelumnya 87% di tahun 2021 menjadi 95% di tahun 2022 untuk indikator kinerja Index Persepsi Kepuasan *Stakeholder*

Penetapan target yang lebih tinggi ini dalam rangka memenuhi ketentuan penetapan target yang baik, juga sebagai upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menyajikan Laporan Kinerja yang lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan reliabel (dapat diandalkan).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan capaian sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

SASARAN 1 INDIKATOR 1

PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

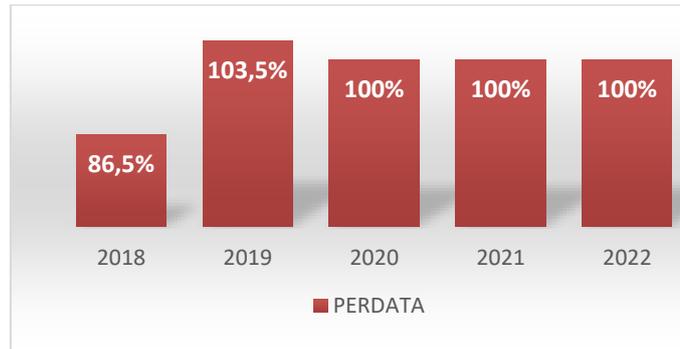
Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara perdata pada tahun 2022 sebanyak 35 perkara, selama tahun 2022 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 35 perkara dan perkara perdata yang diputus tepat waktu juga sebanyak 35 perkara. Dengan demikian tahun 2022 indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 12 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2022	PERDATA	35	35	100%	100%	100%
2021	PERDATA	46	46	100%	100%	100%
2020	PERDATA	30	30	100%	100%	100%
2019	PERDATA	41	44	93,2%	90%	103,5 %
2018	PERDATA	35	44	79,5%	92%	86,5%

Grafik 5 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.
 - Jika dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian pada tahun 2021 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama dua tahun ini telah berkomitmen dan berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.
 - Jika dibandingkan capaian selama tahun 2018-2022 maka dapat dilihat bahwa pencapaian mengalami tren yang cenderung meningkat dari 86,5% ke103,5%, dan tetap di 100% pada tiga tahun terakhir.
- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target antara lain adalah :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Perdata telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
 - ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

SASARAN 1 INDIKATOR 2

PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

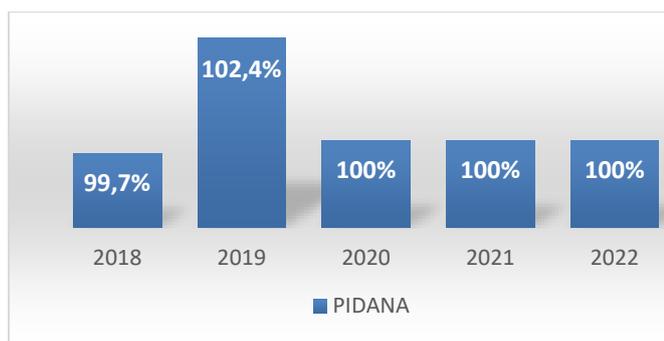
Indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutas. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara pidana pada tahun 2022 sebanyak 158 perkara, selama tahun 2022 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 158 perkara dan perkara pidana yang diputus tepat waktu juga sebanyak 158 perkara. Dengan demikian tahun 2022 indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 13 Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2022	PIDANA	158	158	100%	100%	100%
2021	PIDANA	145	145	100%	100%	100%
2020	PIDANA	103	103	100%	100%	100%
2019	PIDANA	118	128	92,2%	90%	102,4 %
2018	PIDANA	122	133	91,7%	92%	99,7%

Grafik 6 Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian pada tahun 2021 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama tiga tahun ini telah berkomitmen dan berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.

- Jika dibandingkan capaian selama tahun 2018-2022 maka dapat dilihat bahwa pencapaian mengalami tren yang cenderung meningkat dari 99,7% ke 102,4%, dan tetap di 100% pada tiga tahun terakhir.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target antara lain adalah :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
 - ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

SASARAN 1 INDIKATOR 3

PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

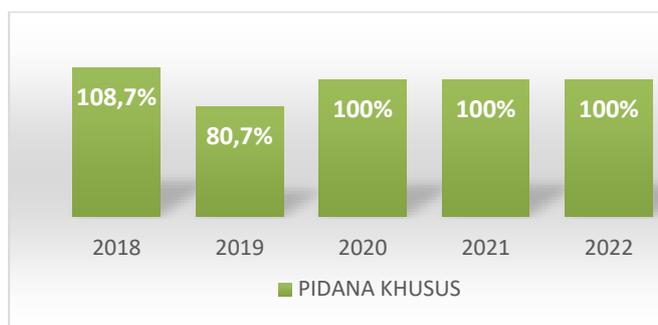
Indikator kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian kinerja indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara pidana khusus pada tahun 2022 sebanyak 8 perkara, selama tahun 2022 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 8 perkara dan perkara pidana khusus yang diputus tepat waktu juga sebanyak 8 perkara. Dengan demikian tahun 2022 indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 14 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2022	PIDANA KHUSUS	8	8	100%	100%	100%
2021	PIDANA KHUSUS	21	21	100%	100%	100%
2020	PIDANA KHUSUS	10	10	100%	100%	100%
2019	PIDANA KHUSUS	8	11	72,7%	90%	80,7 %
2018	PIDANA KHUSUS	19	19	100%	92%	108,7%

Grafik 7 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian pada tahun 2021 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama dua tahun ini telah berkomitmen dan berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.
- Jika dibandingkan capaian selama tahun 2018-2022 maka dapat dilihat bahwa pencapaian mengalami kenaikan dan penurunan namun tetap di 100% pada tiga tahun terakhir.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target antara lain adalah :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
 - ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

SASARAN 1 INDIKATOR 4

PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

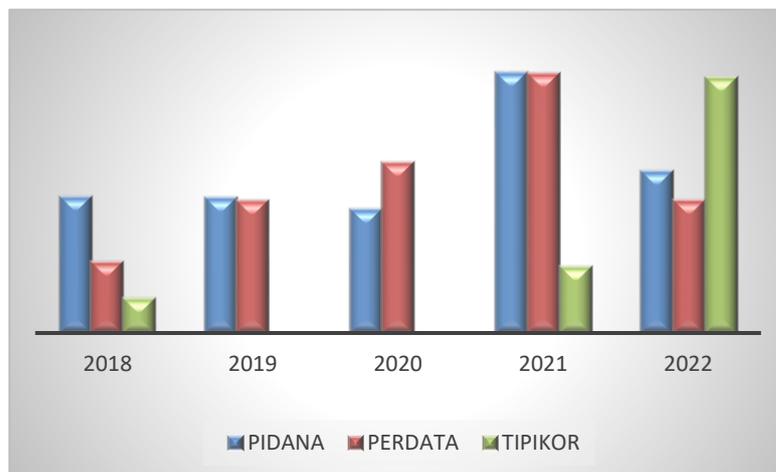
Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang diputus tahun berjalan. Semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum, maka semakin puas dengan putusan pengadilan.

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Sesuai tabel di bawah ini, secara umum Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Tahun 2022 mencapai 100,40%.

Tabel 15 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI	JUMLAH PUTUSAN PERKARA BANDING	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2022	PIDANA	88	158	55,7 %	55%	101,27 %
	PERDATA	16	35	45,7 %	55%	83,09 %
	PIDANA KHUSUS	7	8	87,5 %	55%	159,09 %
	TOTAL	111	201	55,22 %	55%	100,40 %
2021	PIDANA	61	125	48,8 %	30%	162,6 %
	PERDATA	18	37	48,6 %	30%	162 %
	PIDANA KHUSUS	1	8	12,5 %	30%	41,6 %
	TOTAL	80	170	47,06 %	30%	156,86 %
2020	PIDANA	40	103	38,8%	50%	77,6%
	PERDATA	16	30	53,3%	50%	106,6%
	PIDANA KHUSUS	0	10	0 %	50%	0%
	TOTAL	56	143	39,1%	50%	78,2%
2019	PIDANA	50	118	42,4 %	50%	84,7%
	PERDATA	17	41	41,4 %	50%	82,9%
	PIDANA KHUSUS	0	8	0 %	50%	0 %
	TOTAL	67	167	40,1 %	50%	80,2 %
2018	PIDANA	100	122	81,9%	96%	85,3%
	PERDATA	15	35	42,8%	96%	44,6%
	PIDANA KHUSUS	4	19	21,1%	96%	21,9%
	TOTAL	119	176	67,6%	96%	70,41%

Grafik 8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar 55%. Realisasi pada indikator tersebut adalah sebesar 55,22%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.
- Jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi meningkat sebesar 8,16 %, target meningkat sebesar 25% (sebelumnya 30% menjadi 55%) dan capaian kinerja menurun sebesar 56,46%

- Jika dibandingkan capaian kinerja selama tahun 2018-2022 maka dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian mengalami kenaikan dan penurunan, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator tersebut memiliki tren/kecenderungan terus meningkat.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target antara lain adalah :
 - ✓ Pihak yang berperkara puas terhadap putusan yang dibuat di tingkat banding.

SASARAN 1 INDIKATOR 5

INDEX PERSEPSI KEPUASAN *STAKEHOLDER*

Indikator Index Persepsi Kepuasan *Stakeholder* adalah index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Penetapan indikator kinerja ini adalah untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel 16 Index Persepsi Kepuasan Stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Bengkulu

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2022	Index Persepsi Kepuasan <i>Stakeholder</i>	99,07	95	104,28%
2021	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100,00	87	114,9%
2020	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	87,17	85	102,5%
2019	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	86,78	85	102,1%
2018	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80,22	81	99,0%

Survey Index Persepsi Kepuasan *Stakeholder* dilaksanakan pada Periode 1 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2022. Populasi survey ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data sejumlah 104 (seratus empat) orang responden dan berdasarkan hasil survey tersebut seluruh responden mayoritas memberikan penilaian puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu.



Tabel 18 Rata-rata Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur

NO	RUANG LINGKUP	INDEKS RATA-RATA	KONVERSI	KUALITAS
1	Persyaratan	3,96	99,00	Sangat Baik
2	Prosedur	3,96	99,00	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,96	99,00	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,96	99,00	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,96	99,00	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,97	99,25	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,96	99,00	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,94	98,50	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,98	99,50	Sangat Baik
Rata-rata Hasil Survey		3,96	99,07	Sangat Baik

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator Index Persepsi Kepuasan Stakeholder adalah sebesar 95%. Realisasi pada indikator tersebut adalah sebesar 99,07%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah berhasil bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.
- Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian kinerja menurun 10,62% namun capaian kinerja tahun 2022 tetap tinggi diatas 100%. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan target yang cukup signifikan sebesar 8%.
- Jika dibandingkan capaian selama 4 tahun yaitu dari periode 2018-2021 maka dapat dilihat bahwa pencapaian menunjukkan tren atau kecenderungan meningkat dan diatas 100%.
- Berdasarkan hasil perhitungan Index Persepsi Kepuasan Stakeholder, berikut dijelaskan monitoring dan evaluasi dari nilai terendah yaitu :

SARANA DAN PRASARANA

- ✓ Sarana dan Prasarana agar dievaluasi kembali secara berkala dalam pelaksanaan pemberian layanan yang prima kepada *stakeholder*.

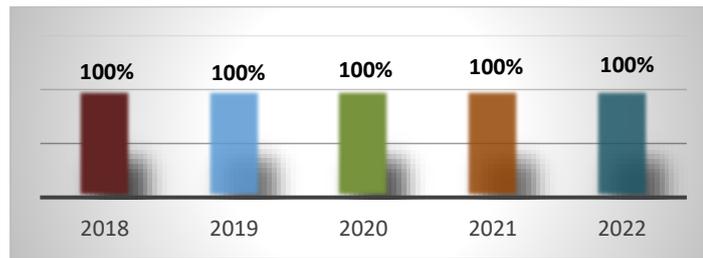
SASARAN STRATEGIS 2.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Tabel 19 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian Sasaran	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 9 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kembali ke Pengadilan Pengaju.

Data pada tabel 13 dan grafik 9 menunjukkan bahwa capaian sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2022 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan sasaran untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Bengkulu di tahun 2022 ini telah tercapai dengan sangat baik.

SASARAN 2 INDIKATOR 1

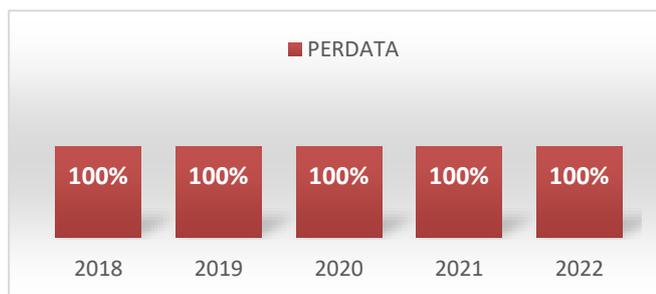
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERDATA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Tahun 2022 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 20 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2022	PERDATA	35	35	100%	100%	100%
2021	PERDATA	46	46	100%	100%	100%
2020	PERDATA	30	30	100%	100%	100%
2019	PERDATA	41	41	100%	100%	100%
2018	PERDATA	35	35	100%	100%	100%

Grafik 10 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2022 adalah sebanyak 35 perkara dan seluruh salinan putusan perkara perdata tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu langsung mengirim salinan putusan perkara perdata selalu tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2022
- Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakangan yaitu tahun 2018 sampai 2022 nilai realisasi dan capaian selalu mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam pelaksanaan pengiriman putusan perkara.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain adalah :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempedomani dan melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Perdata yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
 - ✓ Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.

SASARAN 2 INDIKATOR 2

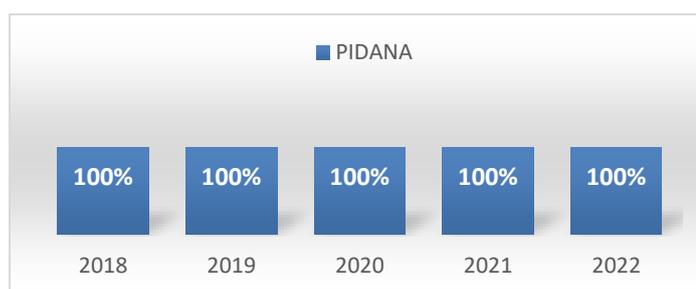
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PIDANA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus. Tahun 2022 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 21 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2022	PIDANA	158	158	100%	100%	100%
2021	PIDANA	145	145	100%	100%	100%
2020	PIDANA	122	122	100%	100%	100%
2019	PIDANA	103	103	100%	100%	100%
2018	PIDANA	122	122	100%	100%	100%

Grafik 11 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2022 adalah sebanyak 158 perkara dan seluruh salinan putusan perkara pidana tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu langsung mengirim salinan putusan perkara pidana selalu tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2022
- Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakangan yaitu tahun 2018 sampai 2022 nilai realisasi dan capaian selalu mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam pelaksanaan pengiriman putusan perkara.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain adalah :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempedomani dan melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
 - ✓ Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.

SASARAN 2 INDIKATOR 3

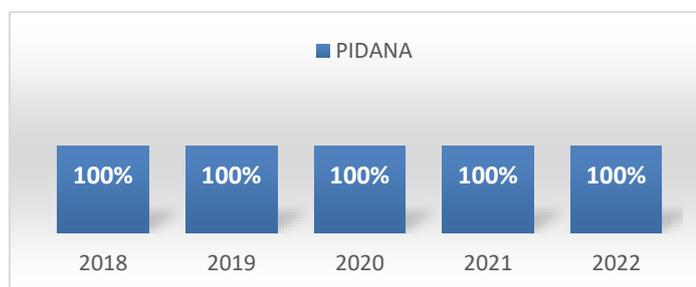
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PIDANA KHUSUS YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diputus. Tahun 2022 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 21 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2022	PIDSUS	8	8	100%	100%	100%
2021	PIDSUS	21	21	100%	100%	100%
2020	PIDSUS	10	10	100%	100%	100%
2019	PIDSUS	8	8	100%	100%	100%
2018	PIDSUS	19	19	100%	100%	100%

Grafik 11 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Jumlah putusan perkara pidana khusus pada tahun 2022 adalah sebanyak 8 perkara dan seluruh salinan putusan perkara pidana khusus tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu langsung mengirim salinan putusan perkara pidana khusus selalu tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Target tahun 2022 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2022
- Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakangan yaitu tahun 2018 sampai 2022 nilai realisasi dan capaian selalu mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam pelaksanaan pengiriman putusan perkara.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain adalah :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempedomani dan melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
 - ✓ Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.

B. REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran yang didapatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.21.468.883.000,- (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :



1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp.21.197.043.000,- (*Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.17.029.689.457,- (*Tujuh Belas Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*)

b. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Jumlah Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.3.168.592.124,- (*Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.820.810.994,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

Tabel 23 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2022

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	17.061.502.000	17.029.689.457	31.812.543	99,81%
Belanja Barang	3.311.375.000	3.168.592.124	92.782.876	97,19%
Belanja Modal	824.166.000	820.810.994	3.355.006	99,59%
TOTAL	21.197.043.000	21.069.092.575	127.950.425	99,40%

Grafik 13 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2022



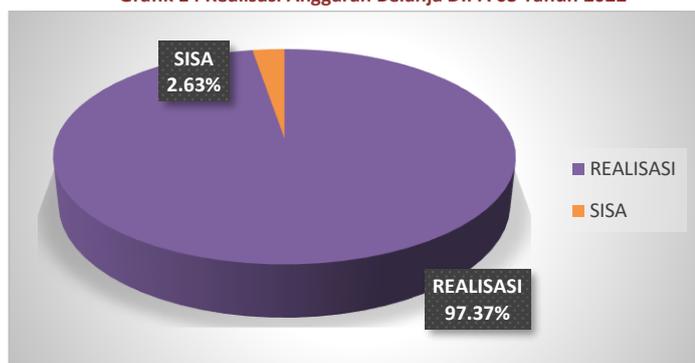
2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)

Tahun 2022 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum berupa Belanja Barang sejumlah Rp.271.840.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*). Belanja Barang pada DIPA 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Tabel 24 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2022

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Barang	271.840.000	264.693.600	7.146.400	97,37%
TOTAL	271.840.000	264.693.600	7.146.400	97,37%

Grafik 14 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2022



REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sedangkan DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 25 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN %
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	20.372.877.000	20.248.281.581	124.595.419	99,39
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	824.166.000	820.810.994	3.355.006	99,59
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	271.840.000	264.693.600	7.146.400	97,37

Tabel 26 Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara

NO	URAIAN	VOLUME	REALISASI
1	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT BANDING	100	158
2	PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT BANDING	42	8

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 27 Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	64.980.000	62.350.600	94,52	2.646.400
2.	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	19.780.000	17.763.000	89,80	2.017.000

INFORMASI KEUANGAN YANG DIBIYAI OLEH PARA PIHAK (Perkara Perdata)

Tabel 28 Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2022

SISA 2021	MASUK 2022	PUTUS 2022	SISA 2022
3	37	35	5

Tabel 29 Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2022

URAIAN	SALDO AWAL (Des 21)	PENERIMAAN 2022	PENGELUARAN 2022	SALDO AKHIR 2022 (Saldo Awal + Penerimaan - Pengeluaran)
Biaya Perkara	Rp. 450.000	Rp. 150.000 x 37 berkas = Rp. 5.550.000	Rp. 150.000 x 35 berkas = Rp. 5.250.000	Rp. 750.000

Adapun rincian biaya perkara sebesar Rp.150.000,- adalah sebagai berikut :

Biaya Pemberkasan	:	Rp.128.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 12.000,-
Biaya Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Total	:	Rp.150.000,-

Gambar 3 Rician Biaya Perkara di SIPP

The screenshot shows the SIPP interface for the case '1/PDT/2022/PT BGL'. The financial journal table is as follows:

No	Tanggal Transaksi	Uraian	Jumlah			Keterangan	Aksi
			Pemasukan	Pengeluaran	Sisa		
1	Senin, 10 Jan. 2022	Biaya Perkara	Rp. 150.000		Rp. 150.000		[edit]
2	Kamis, 27 Jan. 2022	Biaya Pemberkasan		Rp. 130.000	Rp. 20.000		[edit]
3	Kamis, 27 Jan. 2022	Materai		Rp. 10.000	Rp. 10.000		[edit]
4	Kamis, 27 Jan. 2022	Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 0		[edit]
Total			Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 0		

Tabel 29 Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp.	%
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	<u>Program</u> : Dukungan Manajemen <u>Kegiatan</u> : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	20.372.877.000	a. Belanja Non Operasional b. Belanja Gaji dan Tunjangan c. Belanja Operasional	20.372.877.000	19.383.220.969	99,39
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu							
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu							
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi							
		e. Index Persepsi Kepuasan Stakeholder	<u>Program</u> : Dukungan Manajemen <u>Kegiatan</u> : Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingkungan MA	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	824.166.000	a. Belanja Modal Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	824.166.000	820.810.994	99,59
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<u>Program</u> : Penegakan dan Pelayanan Hukum <u>Kegiatan</u> : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	271.840.000	Belanja Barang	271.840.000	264.693.600	97,37
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu							
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu							



BAB IV

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2022 menyajikan 2 (dua) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 5 indikator pada Sasaran I Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 3 indikator pada Sasaran II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 100,47%. Dari 8 indikator kinerja yang diperjanjikan, seluruhnya dinyatakan berhasil karena dapat mencapai target, bahkan ada 2 indikator kinerja yang melampaui target yang diperjanjikan.

Sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan, maka LKJIP Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Bengkulu menyajikan informasi keuangan khususnya keuangan yang dibiayai oleh para pihak (perkara perdata) yang terkait dengan pencapaian kinerja.

Capaian sasaran tahun 2022 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peningkatan fungsi pengawasan bidang dan asesmen internal secara rutin dan berkala
2. Adanya berbagai kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti kegiatan Bimtek, Diklat, Sosialisasi dan Pembinaan
4. Berbagai Inovasi yang diciptakan dan terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi oleh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu
5. Adanya ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.

Hasil Capaian Kinerja pada LKjIP 2022 selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.



B. REKOMENDASI

Walaupun pada tahun 2022 ini seluruh target dapat tercapai namun tetap harus dipersiapkan dalam menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang bisa menyebabkan tidak tercapainya sasaran di masa yang akan datang. Ini sebagai bentuk upaya preventif Pengadilan Tinggi Bengkulu agar tetap bisa mempertahankan capaian kinerja yang baik dan maksimal tersebut di tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itu direkomendasikan untuk terus melakukan :

1. Penguatan Organisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Penguatan Pengawasan internal maupun eksternal serta monitoring evaluasi secara berkala dari Pimpinan Pengadilan
3. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan
4. Penguatan Produktifitas dan Administrasi penyelesaian perkara
5. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat
6. Peningkatan Sarana Prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

PT BENGKULU “CERDAS”

CERMAT - ENYAHKAN KKN - RESPONSIF - DISIPLIN - ADIL - SEJAHTERA